

**ANALISIS RASIO EFISIENSI DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN
DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA
PEMERINTAHAN KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**NAMA : MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT
NPM : 1305170319
KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 7**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Taufik Hidayat

NPM : 1305170319

Program Studi: Akuntansi Keuangan

Judul Skripsi : Analisis Rasio Efisiensi dan Kemandirian Keuangan Daerah
Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintahan
Kabupaten Langkat

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data penelitian dari kantor dimana saya melakukan riset yaitu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, April 2017

Yang membuat pernyataan

Muhammad Taufik Hidayat



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT
NPM : 1305170319
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Penelitian : ANALISIS RASIO EFISIENSI DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN LANGKAT

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan

Medan, April 2017

Diketahui / Disetujui

Pembimbing Skripsi

Ketua Program Studi Akuntansi

(PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si)

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI
JENJANG : STRATA SATU (S-1)

DOSEN PEMBIMBING

KETUA PROG. STUDI : ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si
DOSEN PEMBIMBING : Pandapotan Ritonga, SE, M.Si

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT
NPM : 1305170319
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : KEUANGAN
JUDUL PROPOSAL : Analisis Rasio Efektivitas, Efisiensi dan Kemandirian
Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan
Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat.

TANGGAL	BIMBINGAN PROPOSAL	PARAF	KETERANGAN

Medan, Februari 2017

Pembimbing Proposal

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi Akuntansi

(Drs. MARNOKO, M.Si)

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT

N P M : 1305170319

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN

**Judul Skripsi : ANALISIS RASIO EFISIENSI DAN KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA
KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAHAN
KABUPATEN LANGKAT**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan Skripsi.

Medan, April 2017

Pembimbing Skripsi

(PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

(ZULASPAN TUPTI, SE, M.Si)

ABSTRAK

MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT. 1305170319. Analisis Rasio Efisiensi dan Kemandirian Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat Medan, 2017. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah yang dilihat dari Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Hasil penelitian ini berdasarkan atas analisis Laporan Realisasi APBD Kabupaten Langkat menunjukkan bahwa Rasio Efisiensi Kabupaten Langkat sudah cukup Efisien namun penurunan Rasio Efisiensi masih terjadi yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan daerah yang diikuti oleh peningkatan belanja daerah. Berdasarkan hasil analisis data, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintahannya disebabkan oleh pemerintah daerah masih tergantung pada bantuan dana pihak eksternal (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) penyebab belum madirinya kemandirian keuangan daerah pemerintah kabupaten langkat disebabkan oleh Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi pemerintah pusat yang tercermin dari besarnya bantuan pusat baik dari sudut anggaran rutin yaitu melalui subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pembangunan yaitu bantuan pembangunan daerah, Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah(PAD) yang relatif kecil dibandingkan Pendapatan Transper, Kurangnya usaha dan kemampuan pemerintah daerah mengelola dan menggali sumber pendapatan yang ada, Masih tingginya jumlah belanja rutin daripada belanja modal daerah, Belum mandirinya pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaan belanja pemerintahannya.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi dan Kemandirian Keuangan Daerah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr,Wb

Alhamdulillah wasyukurilah segala puji bagi Allah Swt penulis panjatkan. Atas semua limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya Shalawat serta Salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatNya yang telah menjadi jalan bagi umatNya dalam menempuh keselamatan dan kebahagiaan dengan ilmu pengetahuan yang benar sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan yaitu Skripsi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara dengan judul “**Analisis Rasio Efisiensi dan Kemandirian Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat**” dengan lancar.

Skripsi ini disusun dengan penuh itikad, semangat serta keihklasan untuk memberikan sumbangsih pengetahuan serta pengalaman terhadap pengembangan kajian ilmu Ekonomi, khususnya Akuntansi. Penulis menyadari bahwa karya ini hanyalah sebagian kecil dari ribuan karya yang lain, namun penulis berharap agar karya ini tetap memberikan sedikit kontribusi untuk penelitian selanjutnya.

Di samping itu, penulis juga tidak dapat memugkiri bantuan dari pihak lain dalam penyusunan skripsi sangat berperan. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan materil maupun ilmu kepada :

1. **Ayahanda Syamsul Bahri dan Ibunda Hayati** serta Abangnda Dahri Fauzi dan adik adikku sekalian atas cinta dan kasih sayangnya serta doa, dorongan,

semangat, pengorbanan, perhatian dan dukungan baik moral maupun finansial yang diberikan. Semoga dengan penyusunan skripsi ini dapat membanggakan.

2. **Bapak Dr. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Bapak Zulaspan Tupti, S.E., M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. **Ibu Elizar Sinambella SE, M.Si**, Ketua Program Studi Akuntansi Program S1 Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Seluruh staf Pengajar jurusan Akuntansi Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
5. **Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si**, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. **Bapak Pandapotan Ritonga, SE, M.Si** selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis dan memberikan masukan serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
7. **Bapak Drs. H. Mulyono M.Si**, selaku Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Langkat yang telah membantu dalam penelitian ini serta yang telah memerikan ijin kepada peneliti melakukan riset.
8. **Bapak Hery Susanto, SE**, selaku Kabid Pembukuan dan Verifikasi BPKAD Kabupaten Langkat yang telah memberikan peneliti data Laporan Realisasi APBD Kab. Langkat demi kelancaran proses penelitian ini.
9. **Seluruh Staff Pengajar** di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terutama biro Akuntansi teimah kasih atas semua bantuan dan semua informasinya selama ini kepada penulis.

10. Kepada teman-teman saya **Fuad fadillah, Wahyu Irawan, Sri Devi Handayani, Mhd. Khuzafah Nst** yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. **Seluruh teman-teman Akuntansi A Sore** yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat berguna untuk penyempurnaan karya ini. Akhir kata penulis harapkan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan khususnya bagi penulis sendiri.

Billahi fii Sabililhaq fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikum Wr,Wb

Medan, 9 Maret 2017

Penullis

Muhammad Taufik Hidayat

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	i i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teori.....	10
1.1 Kinerja Keuangan Daerah.....	10
1.1.1 Pengertian Kinerja.....	10
1.1.2 Pengertian Keuangan Daerah.....	11
1.1.3 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah.....	12
1.1.4 Analisis Kinerja Keuangan Daerah.....	14
1.2 Pengukuran Kinerja Pemerintah.....	16
1.2.1 Definisi Pengukuran Kinerja.....	16
1.2.2 Elemen Pokok Pengukuran Kinerja.....	17
1.2.3 Tujuan Pengukuran Kinerja.....	18
1.2.4 Manfaat Pengukuran Kinerja	18

1.3 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.....	19
1.3.1 Definisi APBD.....	19
1.3.2 Bentuk APBD.....	20
1.4 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....	22
1.5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	23
B. Penelitian Terdahulu	25
C. Kerangka Berfikir	27

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	30
B. Definisi Operasional	30
1.1 Kinerja Keuangan Daerah.....	30
1.2 Perbedaan Akuntansi Pemerintah dan Perusahaan.....	32
1.3 Rasio Efisiensi.....	32
1.4 Rasio Kemandirian.....	33
C. Tempat dan Waktu Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data	36

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	37
1.1 Gambaran Umum Kabupaten Langkat.....	37
1.2 Visi dan Misi BPKAD Kabupaten Langkat.....	38
B. Deskripsi Data.....	40
1.1 Rasio Efisiensi.....	40

1.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	42
C. Pembahasan.....	43
1.1 Rasio Efisiensi.....	43
1.1.1 Penyebab Penurunan Efisiensi.....	45
1.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	45
1.2.1 Penyebab Pemerintah Daerah Belum Mandiri.....	47
1.3 Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Langkat.....	48

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	49
B. Keterbatasan Penelitian.....	50
C. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten Langkat.....	4
Tabel 1.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten Langkat.....	5
Tabel 2.1 Persentase Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....	23
Tabel 2.2 Persentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	25
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian.....	34
Tabel 4.1 Rincian Wilayah Kabupaten Langkat.....	37
Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Efisiensi	41
Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	42

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengatur roda pemerintahan di daerah, pembangunan daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Suatu daerah dapat dikatakan maju dan berkembang apabila menjalankan roda pemerintahan dengan transparan akuntabilitasnya dan penerepan *value for money* yang benar. Sebagai organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan/laba, pemerintah daerah memiliki tujuan utama yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, infrastruktur, dan penyediaan barang kebutuhan publik.

Sehubungan dengan berkembangnya perubahan maupun globalisasi khususnya bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi ini, sangat berdampak pada perubahan pola pikir masyarakat, terutama yang berkaitan dengan transparansi keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Oleh karena itulah sebagai konsekuensinya tentang dikeluarkannya Ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan

landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang sekarang menjadi UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang sekarang menjadi UU No. 33 tahun 2004.

Menurut (Mahmudi, 2007:3), Salah satu pilar utama tegaknya akuntabilitas suatu negara adalah adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan. Para pemangku kekuasaan yang akuntabel adalah mereka yang terpercaya dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya”

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah seperti diatas dan Desentralisasi Fiskal, maka terjadi perkembangan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Perubahan yang terjadi seperti dari sistem Sentralisasi menjadi Desentralisasi, dari sistem Akuntansi *Singel Entry* dan *Cash Basis* menjadi sistem Akuntansi *Double Entry* dan *Accrual Basis*. Otonomi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi ini lebih megacu kepada daerah kabupaten/kota berhubungan langsung dengan masyarakat.

Pembangunan daerah tidak lepas dari pengelolaan pihak terkait. Masing-masing daerah memiliki cara kerja yang berbeda dalam melakukan pengelolaan sehingga prestasi atau kinerjanya berbeda. Penilaian kinerja berasal dari

penentuan secara periodik tentang aktivitas operasional suatu organisasi, bagian pemerintahan dan organisasi yang bersangkutan berdasarkan sasaran atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui kinerja keuangan yang diukur dengan Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masyarakat dapat menilai bagaimana kinerja pemerintah.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi wewenang menjalankan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya dalam bentuk laporan keuangan yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 tentang penyajian Laporan Keuangan.

Beberapa permasalahan keuangan yang dapat dianalisa di Kabupaten Langkat antara lain (1) terdapat penurunan efisiensi pemerintah dalam membiayai pemerintahannya, (2) belum mandiri pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya.

Oleh sebab itu dari data diatas perlu dilakukannya analisis rasio keuangan daerah pada pemerintahan Kabupaten Langkat dengan menggunakan Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah untuk mengukur sebagaimana permasalahan yang dihadapi pada pemerintahan Kabupaten Langkat pada suatu periode tertentu.

Analisis kinerja pengelolaan keuangan dan kemandirian daerah Kabupaten Langkat adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Kabupaten Langkat dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Rasio Efisiensi dan

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat.”

Menurut Bastian Indra (2006:61), Pengukuran atau Penilaian Kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk memenuhi hal-hal dalam membantu memperbaiki kinerja pemerintah sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian layanan, melakukan pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, dan mewujudkan pertanggungjawaban dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Tabel 1.1
Rasio Efisiensi PAD
Pemerintahan Kabupaten Langkat

Tahun	Rasio Efisiensi
2011	95,96%
2012	96,42%
2013	98,77%
2014	95,43%
2015	90,02%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Langkat (diolah) 2017

Dilihat Tabel 1.1 Persentase Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Langkat pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 cukup efisien atau berada dibawah 100%. Hal ini menunjukkan biaya yang dikeluarkan pemerintah lebih kecil dari pada pendapatan yang direalisasikan.

Namun dari data tabel diatas juga menunjukkan pada tahun 2011, 2012 dan 2013 pemerintah daerah mengalami penurunan efisiensi, terutama pada tahun 2013 yang mengalami penurunan yang signifikan. Pemerintah daerah dapat dikatakan mampu melaksanakan otonomi daerah jika mampu mengelola ataupun

menggali sumber – sumber keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.(Nataluddin, 2001:167)

Oleh sebab itulah penurunan Rasio efisiensi diatas menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Langkat belum mampu melaksanakan otonomi daerah jika dilihat dari peningkatan pendapatan yang diikuti dengan peningkatan belanja daerah.

Pengukuran Efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antar output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan dengan semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Sebaliknya bila rasio efisiensi semakin tinggi menunjukkan bahwa besarnya biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pada input yang didapat.

Tabel 1.2
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Pemerintahan Kabupaten Langkat

Tahun	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2011	3,27%
2012	10,77%
2013	4,62%
2014	6,99%
2015	6,80%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Langkat (diolah) 2017

Dapat dilihat dari Tabel 1.2 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Langkat pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 ialah Instrukturif. Dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten sedikit leih baik pada tahun 2012 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2013.

Menurut uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama lima tahun pada Pemerintah Kabupaten Langkat

memiliki rata – rata kemandiriannya masih tergolong rendah sekali dalam kategori pola hubungan Instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 0 – 25%. Rasio kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Langkat dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.

Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan semakin rendah rasio kemandirian maka semakin tinggi ketergantungan daerah pada bantuan pihak eksternal. (Abdul Halim, 2004:233).

Pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Abdul Halim (2001: 261), Pola instruktif merupakan peranan Pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah daerah.

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian mengenai Kinerja Keuangan Daerah. Hal ini dikarenakan kinerja keuangan pemerintah merupakan tolak ukur penilaian efisiensi, efektivitas dan kemandirian pemerintah dalam mengelola organisasi pemerintahannya.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Puput Risky Pramita (2015) dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Efektivitas Keuangan DPPKAD Kabupaten Kebumen pada tahun 2009 dan 2010 tidak

efektif, Efisiensi Keuangan Daerah DPPKAD Kabupaten Kebumen pada tahun 2009 dan 2010 tidak efisien dan Kemampuan Keuangan DPPKAD Kabupaten Kebumen pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 tergolong masih sangat rendah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Kinerja Keuangan Daerah. Adapun judul yang akan diangkat peneliti dalam penelitian ini adalah “*Analisis Rasio Efisiensi dan Kemandirian Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat*”

B. Identifikasi Masalah

Setelah melakukan penelitian pendahuluan pada pemerintahan Kabupaten Langkat, maka identifikasi masalah yang ditemukan adalah:

1. Terdapat penurunan Rasio efisiensi pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaan pemerintahannya.
2. Masih kecilnya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada pemerintahan Kabupaten Langkat

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengapa Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat pada tahun 2011, 2012 dan 2013 mengalami penurunan ?

- b. Mengapa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Belum Mandiri Dalam Membiayai Kegiatan Pemerintahannya ?
- c. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah pemerintah Kabupaten Langkat jika dilihat dari Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya penurunan Rasio Efisiensi keuangan daerah pemerintah Kabupaten Langkat yang dilihat dari Rasio Efisiensi PAD.
- b. Untuk mengetahui penyebab tidak mandirinya keuangan pemerintah daerah Kabupaten Langkat yang dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
- c. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten Langkat jika dilihat dari Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

1.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat ditinjau dari teori Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran Pemerintah Daerah dalam menganalisis Kinerja Keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.
- b. Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan pengaruh penerapan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, semoga penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1.1 Kinerja Keuangan Daerah

1.1.1 Pengertian Kinerja

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu, sedangkan menurut Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Kinerja adalah hasil yang dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan seseorang dalam melaksanakan kerja atau tugas. Kinerja merupakan prestasi kerja atau performance, yaitu hasil kerja selama periode tertentu dibanding dengan berbagai kemungkinan.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan, Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas yang terukur.

Menurut Jumingan (2006: 239)

“Kinerja merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam kegiatan operasionalnya baik menyangkut aspek keuangan,

aspek pemasaran, aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana, aspek teknologi, maupun aspek sumber daya manusianya”.

Mardiasmo (2002) mendefinisikan “sistem pengukuran kinerja publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial dan non financial”. Adapun Indikator kinerja seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002) bahwa sekurang – kurangnya ada empat tolak ukur penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu :

1. Penyimpangan antara realisasi anggaran dengan yang ditargetkan yang ditetapkan dalam APBD.
2. Efisiensi biaya
3. Efektivitas program
4. Pemerataan dan keadilan

1.1.2 Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (2008: 18-19) keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dikuasai atau dimiliki negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perrundang-undangan yang berlaku.

Abdul Halim (2008: 25) menyatakan keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan barang-barang iinventaris milik daerah. Di lain pihak, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan

kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara. Keuangan daerah berperan penting dalam otonomi daerah karena dari keuangan daerah menggambarkan cerminan kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi.

Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai isi pasal 4 yaitu :

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

1.1.3 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Anthon Simbolon (2006) Kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Kinerja Keuangan pemerintah daerah didefinisikan sebagai berikut : Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah

yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran”.

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan apa yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus begitu juga sebaliknya apabila pencapaian tidak mencapai apa yang direncanakan maka dapat dikatakan kinerja belum maksimal.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Abdul Halim, 2008: 230).

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntasiannya dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Abdul Halim, 2008: 231-232).

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Menurut Mohammad Mahsun (2012:196) indikator Kinerja Keuangan Daerah meliputi :

1. Indikator Masukan (Inputs), misalnya :
 1. Jumlah dana yang dibutuhkan
 2. Jumlah pegawai yang dibutuhkan
 3. Jumlah infrastruktur yang ada

4. Jumlah waktu yang digunakan
2. Indikator Proses (Proces), misalnya :
 1. Ketaatan pada peraturan perundangan
 2. Rata – rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa
3. Indikator Keluaran (output), misalnya :
 1. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan
 2. Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa
4. Indikator Hasil (Outcome), misalnya :
 1. Tingkat kepuasan masyarakat
 2. Produktivitas para karyawan atau pegawai
5. Indikator Manfaat (Benefit), misalnya :
 1. Tingkat kepuasan masyarakat
 2. Tingkat partisipasi masyarakat
6. Indikator Impact, misalnya :
 1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
 2. Peningkatan pendapatan masyarakat

1.1.4 Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mohammad Mahsun (2012: 135), Analisa Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004), Rasio Keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti). Misalnya , antara utang dan modal, kas dan total aktiva, harga pokok penjualan dan penjualan, dan sebagainya.

Selain itu Sofyan Syafri Harahap (2004) juga menyatakan bahwa , Analisis rasio keuangan daerah adalah usaha mengidentifikasi ciri – ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam

rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilakukan meskipun pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Abdul Halim 2007: L-4).

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerah relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah lainnya. Terdapat beberapa pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah sebagai berikut : DPRD, Pihak Legislatif, Pemerintah Pusat/Provinsi, Serta masyarakat dan kreditor (Abdul Halim 2007:L-4).

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 108/2000 pihak – pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD adalah :

1. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat) ialah badan yang memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengelola laporan keuangan daerah.
2. Badan Eksekutif, merupakan Badan penyelenggara pemerintahan yang menerima otorisasi pengelolaan keuangan daerah dari DPRD, seperti Gubernur, Bupati, Walikota, serta pimpinan unit Pemerintah Daerah lainnya.
3. Badan Pengawas Keuangan adalah Badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Yang termasuk dalam badan ini adalah Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

4. Investor, Kreditor dan Donatur, merupakan Badan atau organisasi baik pemerintah, lembaga keuangan, maupun lainnya baik di dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah.
5. Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah, yaitu Pihak – pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan Pemerintah Daerah, seperti Lembaga Pendidikan, Ilmuwan, Peneliti dan lain – lain.
6. Rakyat, disini adalah Kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas Pemerintah khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau yang menerima produk dan jasa dari Pemerintah Daerah.
7. Pemerintah Pusat, memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggung jawaban Gubernur sebagai wakil pemerintah.

Terdapat beberapa cara yang dilakukan peneliti dalam mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah : Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

1.2 Pengukuran Kinerja Pemerintah

1.2.1 Definisi Pengukuran Kinerja

Robertson (2002) menyatakan bahwa pengukuran kinerja (*Performance measurement*) merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai

seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Menurut Anthon Simbolon (2003)

“Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai setiap pencapaian indikator tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik”.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan efektivitas dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

1.2.2 Elemen Pokok Pengukuran Kinerja

Menurut Mohammad Mahsun (2006: 146-149) elemen pokok suatu pengukuran kinerja antara lain :

1. Menetapkan Tujuan, Sasaran dan Strategi Organisasi
2. Merumuskan Indikator dan Ukuran Kinerja
3. Mengatur Tingkat Ketercapaian Tujuan dan Sasaran – sasaran Organisasi
4. Evaluasi Kinerja
 1. *Feedback*
 2. Penilaian Kemajuan Kinerja
 3. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

1.2.3 Tujuan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja pemerintah bertujuan untuk menilai sejauh mana mereka mampu menyediakan produk (jasa) yang berkualitas dengan biaya yang layak. Bagi organisasi pemerintah, kinerja pelayanan publik merupakan salah satu keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Dwiyanto, 2003).

Oleh sebab itu dibawah ini merupakan tujuan Pengukuran Kinerja Menurut Masdiasmo (2002: 121), Tujuan pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk memenuhi tiga maksud yaitu :

1. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik.
2. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

1.1.4 Manfaat Pengukuran Kinerja

Menurut Ihyaul Ulum (2004: 277), Penilaian kinerja mempunyai manfaat bagi organisasi, yaitu :

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan menilai kinerja manajemen.
2. Menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Memonitor dan Mengevaluasi kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya.
4. Membantu mengungkap dan memecahkan masalah yang ada.

5. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
6. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1.3.1 Definisi APBD

Dalam mengukur suatu kinerja Pemerintah Daerah tentunya bersumber dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah direalisasikan pada periode tertentu. Untuk itu disini peneliti menjabarkan informasi apa saja yang terdapat dalam pengukuran kinerja keuangan suatu pemerintah daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat disuatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber – sumber kekayaan daerah (UU Keuangan Negara, 2002). Sedangkan menurut Undang – Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Menurut Abdul Halim (2007: 20)

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur – unsur sebagai berikut : rencana kegiatan suatu daerah, berserta urainnya secara rinci; adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya – biaya yang sehubungan dengan aktivitas – asktivitas tersebut, dan adanya biaya – biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran – pengeluaran yang akan dilaksanakan; jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka; peiode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) Tahun”.

Siklus APBD terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeriksaan, serta penyusunan dan penetapan perhitungan APBD. Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggung jawaban APBD. Pertanggung jawaban itu dilakukan dengan menyampaikan perhitungan APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk pemerintah daerah tingkat I dan kepada Gubernur untuk Pemerintah Daerah tingkat II, jadi pertanggungjawaban bersifat vertikal.

1.3.2 Bentuk APBD

Bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 adalah :

1. Pendapatan, yang dibagi menjadi tiga kategori :
 1. Pendapatan Asli Daerah, merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.
 2. Dana perimbangan, merupakan dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan pada daerah untuk membiayai kebutuhan dananya.
 3. Lain –lain Pendapatan yang sah, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, pinjaman, ekuitas dana dan cadangan, aset dan sisa anggaran.
2. Belanja, yang digolongkan menjadi tiga, yaitu :
 1. Belanja Aparatur Daerah, merupakan belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur, contohnya pembelian kendaraan dinas, pembelian bangunan gedung dan lain sebagainya.

2. Belanja Pelayanan Publik, merupakan belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum, contohnya pembangunan jembatan dan jalan raya sebagainya.

Pada organisasi Pemerintah Daerah laporan keuangan yang dikehendaki diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000, Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 pasal 81 ayat (1) serta lampiran XXIX butir (1), PP Nomor 58 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2003 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, PP Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan yang diperbarui lagi melalui PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai PP nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LKE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama, karena anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat

stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Laporan Realisasi Anggaran menduduki prioritas yang lebih penting dan merupakan jenis laporan keuangan daerah yang paling dahulu dihasilkan sebelum kemudian disyaratkan untuk membuat laporan arus kas.

Menurut Permendagri No. 4 Tahun 2008 Laporan Relisasi anggaran adalah sebagai berikut : Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu.

1.4 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Analisis tingkat efisiensi keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rasio efisiensi, yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Menurut Abdul Halim (2007: 234). Efisien yang dimaksud disini ialah merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Rasio Efisiensi keuangan daerah dapat diukur dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Persentase Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Dibawah 60	Sangat Efisien
60 – 80	Efisien
80 – 90	Kurang Efisien
90 – 100	Cukup Efisien
100 – ke atas	Tidak Efisien

Sumber: Mohammad Mahsun 2006

1.5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim, (2007: 234) Kemandirian Keuangan Daerah atau ekonomi fiskal menunjukkan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Abdul Halim (2001: 261) mengemukakan mengenai pola hubungan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah terutama pelaksanaan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Pola hubungan instruktif, dimana peranan Pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

3. Pola hubungan partisipatif, peranan Pemerintah pusat sudah mulai berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar – benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Dana Bagi Hasil, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Transfer Pemerintah Pusat, Dana Penyesuaian, Transfer Pemerintah Provinsi dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Sebagai pedoman pola hubungan dengan kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Persentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Daerah	Kemandirian	Pola Hubungan

Dibawah 60	0 – 25	Instruktif
60 – 80	25 – 50	Konsultif
80 – 90	50 – 75	Partisipatif
90 – 100	75 – 100	Delegatif

Sumber: Mohammad Mahsun 2006

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Puput Risky Pramita (2015)	Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa analisis rasio di atas Pemerintahan Kabupaten Kebumen bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama lima tahun pada Pemerintah Kabupaten Kebumen memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong Rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan instruktif. Jadi Kemandirian Keuangan DPPKAD Kabupaten Kebumen secara keseluruhan dapat dikatakan sangat rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih

			sangat tinggi.
2.	Anindyati Suhartini S. Motto (2010)	Analisis Kinerja Keuangan APBD pada Pemerintah Daerah Kota Gorontalo	Hasil penelitian ini menunjukkan Kinerja Keuangan Pemerintah dinilai tidak efektif atau belum baik karena hanya rasio efisiensi saja yang memenuhi standar keuangan sedangkan rasio lainnya sebagian besar masih pada kriteria tidak efektif.
3.	Jusmawati (2011)	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan Kinerja Keuangan daerah Pemkab Soppeng dalam delapan tahun terakhir terbukti baik. Hal ini dapat dilihat melalui perhitungan rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan dari tahun 2003 – 2010.
4.	Bahrin Assidiqi (2014)	Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 – 2012	Hasil penelitian ini adalah menunjukkan Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten tahun 2008 – 2012 secara umum dapat dikatakan baik, meskipun tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin tinggi dan pemungutan pajak daerah masih belum efisien. Hasil Kinerja Keuangan Belanja Daerah secara umum dapat dikatakan baik, tetapi dalam keserasian belanja belum terjadi keseimbangan antara Belanja Operasi dengan Belanja Modal.
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Fitriyah Agustin (2007)	Pengukuran Kinerja	Hasil penelitian ini

		Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar).	menyatakan bahwa berdasar Rasio Keuangan APBD maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah baik jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan dan Rasio DSCR. Namun dikatakan kurang baik apabila dilihat dari Rasio Kemandirian, Rasio Aktifitas dan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi PAD. Pemerintah daerah belum bisa menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien karena masih banyak rasio – rasio yang menunjukkan kurangnya kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengelola sumber dana yang dimilikinya.
--	--	--	---

C. Kerangka Berpikir

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program dan kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Indikator kinerja merupakan ukuran kualitas yang telah ditetapkan dengan memperhatikan indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja keuangan suatu daerah.

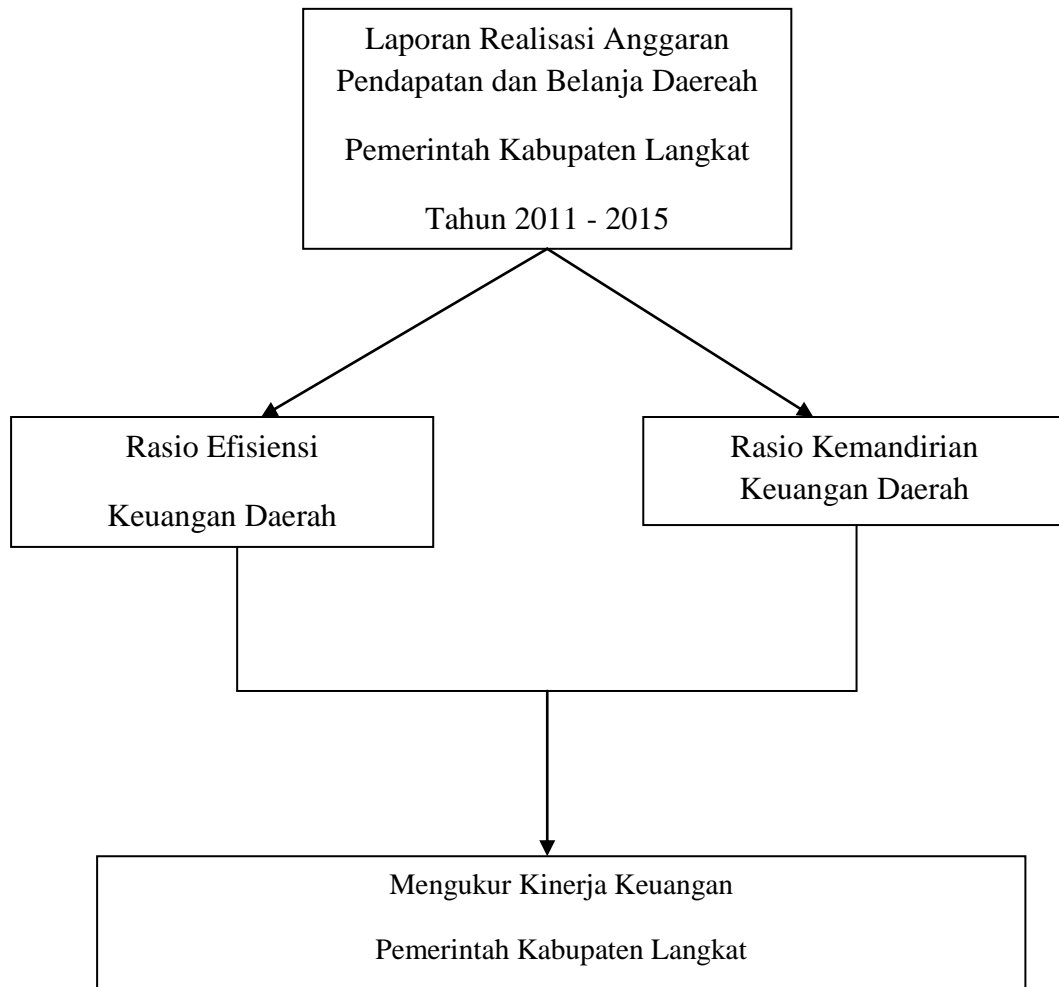
Menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Langkat adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan

pekerjaan/kegiatan Kabupaten Langkat dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu.

Untuk mengetahui bagaimanakah kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Langkat yaitu dengan melakukan analisis laporan keuangan dengan menggunakan analisis keuangan terhadap APBD. Dengan menggunakan rasio efisiensi dan rasio kemandirian tersebut dapat diketahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Langkat. Jika semua rasio diatas menunjukkan hasil angka yang sesuai target, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat dapat dikatakan baik.

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan membandingkan dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintahan daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Oleh sebab itu disini peneliti hanya menitik beratkan penilaian kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Langkat tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dengan menggunakan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Berikut dapat dijelaskan kerangka berpikir dalam penelitian ini seperti pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2007, hal. 11). Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

B. Definisi Operasional Variabel

1.1 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Kinerja Keuangan pemerintah daerah didefinisikan sebagai berikut : Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Abdul Halim, 2008: 230).

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio efisiensi dan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio efisiensi digunakan untuk melihat seberapa besar pemerintah daerah sudah efisien mengelola pendapatan yang digunakan untuk pembiayaan seluruh kegiatan pemerintahan. Rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengukur seberapa besar pemerintah daerah telah mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya yang ditunjukkan oleh beberapa pola hubungan kemandirian diantaranya:

1. Pola hubungan instruktif, dimana peranan Pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, peranan Pemerintah pusat sudah mulai berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar – benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

1.2 Perbedaan Akuntansi Pemerintah dan Perusahaan

Pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan perusahaan swasta tentunya berbeda, jika perusahaan swasta yang berorientasi pada keuntungan/laba sedangkan pemerintah daerah yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Hal – hal yang menjadi perbedaan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dengan perusahaan swasta (komersial) adalah sebagai berikut :

1. Prinsip akuntansi komersial menggunakan basis akuntansi Akrua, sedangkan dalam prinsip akuntansi pemerintah menggunakan cash to akrua.
2. Akuntansi pemerintah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP).
3. Akuntansi komersial menggunakan standar PSAK.
4. Tidak adanya perhitungan laba – rugi pada pemerintahan, sedangkan pada perusahaan bisnis, bottom line (angka laba rugi) sangat penting. Pada umumnya, dipemerintahan terdapat perhitungan anggaran – realisasi dan perhitungan pendapatan – belanja, yang akan menghasilkan angka surplus atau defisit.

1.3 Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Efisien yang dimaksud disini ialah merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

1.4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengindikasikan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat (transfer pusat) maupun dari pinjaman.

Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Rasio Kemandirian juga mengarah kepada ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal, terutama dari pemerintah pusat dan provinsi. Semakin tinggi Rasio Kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan sebaliknya.

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembanguan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Untuk menilai tinggi rendahnya Rasio Kemandirian pemerintah daerah, bisa mengacu pada Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2996, sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat yang berlokasi di Jln. Khairil Anwar No. 1 Stabat. Penelitian ini dimulai bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017.

Adapun jadwal penelitian akan dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April					
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Penelitian Pendahuluan (Prariset)	■	■																				
Pengajuan Judul			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
Penyusunan Proposal											■	■	■	■								
Bimbingan Proposal											■	■	■	■								
Seminar Proposal															■	■	■	■				
Pengumpulan Data											■	■	■	■	■	■	■	■				
Penyusunan Skripsi																	■	■	■	■		
Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■	■	■
Analisis Data															■	■	■	■	■	■	■	■
Sidang Skripsi																						■

D. Jenis Dan Sumber Data

1.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini termasuk data kuantitatif dan data kualitatif. yaitu data yang berbentuk angka-angka dan dapat dihitung seperti laporan keuangan.

1.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Sumber data dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat dimulai dari tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu :

- Studi dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan cara memperoleh data dari kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat serta melihat dan mempelajari hal-hal yang berupa catatan maupun penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada serta mencatat data tertulis yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan – perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan topik penilitan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam analisis deskriptif ini adalah sebagai berikut:

Tahap Pertama:

1. Mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
2. Menghitung rasio – rasio kinerja keuangan APBD pada Laporan Realisasi APBD Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
3. Membandingkan rasio kinerja keuangan APBD 5 tahun terakhir.
4. Menginterpretasikan terhadap kriteria maupun pola hubungan rasio kinerja keuangan APBD.

Tahap Kedua: Menganalisis hasil temuan penelitian kemudian memberikan kesimpulan dan saran sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan Pemerintah Daerah tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1.1 Gambaran Umum Kabupaten Langkat

Kabupaten Langkat merupakan sebuah kabupaten yang berada di provinsi Sumatera Utara yang beribu kota Stabat. Dan berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 1995 telah ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Langkat 17 Januari 1750, dengan Motto : ”Bersatu Sekata Berpadu Berjaya”.

Kabupaten Langkat memiliki jarak rata-ratanya dari Kota Medan sekitar 60 km ke arah barat laut, dan berbatasan langsung dengan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Kabupaten Langkat beribukota di Stabat. Wilayah Kabupaten Langkat terdiri dari 23 kecamatan yang tersebar di dalam 3 wilayah yaitu Wilayah I Langkat Hulu, Wilayah II Langkat Hilir dan Wilayah III Teluk Haru.

Tabel 4.1

Rincian Wilayah Pemerintah Kabupaten Langkat

No	Kecamatan	Luas wilayah Km ²	Desa / Kelurahan	Jarak Km
1	Bahorok	884,79	19	73
2	Serapit	122,95	10	60
3	Salapian	187,96	17	55
4	Kutambaru	244,11	8	65

No	Kecamatan	Luas wilayah Km ²	Desa / Kelurahan	Jarak Km
5	Sei Bingai	338,45	16	45
6	Kuala	179,95	16	40
7	Selesai	152,08	14	30
8	Binjai	49,55	7	23
9	Stabat	90,64	12	-
10	Wampu	193,75	14	5
11	Batang Serangan	934,90	8	31
12	Sawit Seberang	435,07	7	28
13	Padang Tualang	274,91	12	36
14	Hinai	114,28	13	14
15	Secanggang	248,73	17	23
16	Tanjung Pura	165,78	19	18
17	Gebang	162,99	11	32
18	Babalan	101,80	8	40
19	Sei Lapan	306,81	14	40
20	Brandan Barat	92,00	7	45
21	Besitang	597,48	9	61
22	Pangkalan Susu	219,21	11	63
23	Pematang Jaya	165,10	8	75
Kabupaten Langkat		6.263,29	277	-

1.2 Visi dan Misi BPKAD Kabupaten Langkat

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat merupakan lembaga yang mengelola keuangan dan aset daerah pada pemerintahan Kabupaten Langkat, berikut merupakan visi dan misi BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat) diantaranya sebagai berikut :

1. Visi BPKAD Kabupaten Langkat

Adapun Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dirumuskan dan ditetapkan sebagai berikut : “Terwujudnya Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat Berbasis Teknologi Informasi”.

a. Terwujudnya

Mengandung pengertian tercapainya suatu keadaan atau kondisi yang diharapkan atau diinginkan dimasa depan.

b. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatasahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan dan barang daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah dalam bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

c. Berkualitas

Artinya pengelola keuangan harus bersifat akuntabel dalam artian dapat dipertanggungjawaban secara integritas, jujur dan taat terhadap peraturan perundang – undangan, dikelola secara profesional dengan

mengedepankan efisiensi dan efektifitas yang didukung oleh sistem administrasi yang tertib berdasarkan tata cara dan prosedur yang benar.

d. Berbasis Teknologi Informasi

Bahwa pengelolaan keuangan dibangun atas dasar pengembangan teknologi dan kebebasan arus informasi dimana segala proses yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara komputersasi dan aksesnya dapat secara langsung dilihat dan diterima oleh mereka yang membutuhkan.

2. Misi BPKAD Kabupaten Langkat

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat menetapkan misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan sinergitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Meningkatkan sistem pengendalian intern dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Membangun sarana dan prasarana serta pengembangan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya pengelola keuangan dan aset daerah.

B. Deskripsi Data

1.1 Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan rasio yang menunjukkan seberapa efisiensinya pendapatan/input yang telah diperoleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahannya. Rasio efisiensi membandingkan Input yang didapat pemerintah daerah terhadap Output yang dikeluarkan.

Tabel 4.2
Perhitungan Rasio Efisiensi
Pemerintah Kabupaten Langkat

Tahun Anggaran	Total Realisasi Belanja (1)	Total Realisasi Pendapatan (2)	Rasio Efisiensi (1)x(2)/100
2011	1.063.869.134.063,82	1.108.552.889.780,35	95,96%
2012	1.329.229.102.792,52	1.378.567.032.459,08	96,42%
2013	1.536.811.928.028,03	1.555.901.880.204,41	98,77%
2014	1.605.301.211.464,57	1.682.148.382.104,21	95,43%
2015	1.819.224.899.770,10	2.020.688.705.016,79	90,02%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Langkat (diolah) 2017

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Langkat yang telah diketahui antara perbandingan pendapatan daerah dan belanja daerah dapat dikatakan cukup efisien. Rasio Efisiensi pemerintah daerah Kabupaten Langkat pada tahun 2011 memiliki arti bahwasannya besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Langkat dalam memperoleh pendapatan yang diterima sebesar 95,96% ,

kemudian Rasio Efisiensi pemerintah daerah Kabupaten Langkat pada tahun 2012 besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Langkat dalam memperoleh pendapatan yang diterima sebesar 96,42% dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan biaya yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Langkat dalam memperoleh pendapatan yang diterima sebesar 98,77%, tahun 2014 efisiensi besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Langkat dalam memperoleh pendapatan yang diterima sebesar 95,43% dan tahun 2015 biaya yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Langkat dalam memperoleh pendapatan yang diterima sebesar 90,02% .

Dari data diatas dapat disimpulkan efisiensi pad cukup efisien dikarenakan angka efisiensi dibawah 100%. Meskipun demikian biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat untuk memperoleh pendapatannya masih cukup besar.

Namun pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 efisiensi mengalami penurunan sebesar 0,46% pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 sebesar 2,35%. Hal ini menunjukkan belanja pemerintah Kabupaten Langkat pada tahun 2011 sampai tahun 2013 lebih besar dari tahun ke tahun dan pemerintah belum menekan upaya peningkatan belanja daerah.

1.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah sudah mampu mengelola atau membiayai kegiatan pemerintah daerahnya tanpa bantuan dari pihak eksternal seperti pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah mampu melaksanakan otonomi daerahnya dengan baik.

Tabel 4.3
Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Langkat

Tahun	Total Realisasi PAD (1)	Total Realisasi Pendapatan Transfer (2)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (1)x(2)/100	Pola Hubungan
2011	34.540.642.904,35	1.055.735.281.773,00	3,27%	Instruktif
2012	129.242.580.780,08	1.199.681.652.853,00	10,77%	Instruktif
2013	65.521.499.189,41	1.419.706.153.815,00	4,62%	Instruktif
2014	107.811.975.547,21	1.540.371.084.996,00	6,99%	Instruktif
2015	122.715.359.909,79	1.804.265.890.307,00	6,80%	Instruktif

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Langkat (diolah) 2017

Dengan perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah data yang dapat disimpulkan ialah Pada tahun 2011 rasio kemandirian yang mengindikasikan kemampuan pemerintah Kabupaten Langkat untuk memenuhi kegiatan pemerintahannya hanya sebesar 3,27% , tahun 2012 mengindikasikan kemampuan pemerintah Kabupaten Langkat untuk memenuhi kegiatan pemerintahannya

sebesar 10,7%, tahun 2013 mengindikasikan kemampuan pemerintah Kabupaten Langkat untuk memenuhi kegiatan pemerintahannya sebesar 4,62% , tahun 2014 mengindikasikan kemampuan pemerintah Kabupaten Langkat untuk memenuhi kegiatan pemerintahannya sebesar 6,99% dan pada tahun 2015 mengindikasikan kemampuan pemerintah Kabupaten Langkat untuk memenuhi kegiatan pemerintahannya sebesar 6,80%.

C. Pembahasan

1.1 Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat

Rasio Efisiensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Langkat menunjukkan besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Langkat yang digunakan untuk memperoleh pendapatan yang akan diterima. Berdasarkan perhitungan Rasio Efisiensi pemerintah daerah Kabupaten Langkat tahun 2011 sebesar 95,96%, tahun 2012 sebesar 96,42%, tahun 2013 sebesar 98,77%, tahun 2014 sebesar 95,43% dan tahun 2015 sebesar 90,02%. Dari perhitungan rasio efisiensi pendapatan asli daerah Kabupaten Langkat menunjukkan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 rasio efisiensi mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Nataluddin, 2001:167). Pemerintah daerah dapat dikatakan mampu melaksanakan otonomi daerah jika

mampu mengelola ataupun menggali sumber – sumber keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.

Hal ini juga menunjukkan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 pemerintah Kabupaten Langkat belum memaksimalkan pendapatan asli daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahannya. Berdasarkan pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwasannya pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 pemerintah Kabupaten Langkat belum memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) yang dilihat dari naiknya belanja daerah setiap tahunnya.

Rasio Efisiensi pemerintah Kabupaten Langkat tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui realisasi total pendapatan daerah Kabupaten Langkat dari tahun 2011 sampai dengan 2013 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 pendapatan daerah Kabupaten Langkat sebesar Rp. 1.108.552.889.780,35, naik menjadi Rp. 1.378.567.032.459,08 pada tahun 2012. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.555.901.880.204,41.

Total belanja daerah Kabupaten Langkat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 selalu mengalami kenaikan. Dari tahun 2011 total belanja daerah sebesar Rp. 1.063.869.134.063,82, naik menjadi Rp. 1.329.229.102.792,52 pada tahun 2012.

Kemudian pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 1.536.811.928.028,03 naik dari tahun sebelumnya. Dari data diatas pendapatan selalu mengalami kenaikan yang diimbangi dengan belanja daerah yang juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Hasil penelitian ini juga relevan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitriyah Agustin (2007) yang menyimpulkan bahwa Rasio Efisiensi PAD pemerintah daerah Kabupaten Blitar belum bisa menjalankan tugasnya secara efisien karena masih banyak rasio – rasio yang menunjukkan kurangnya kinerja pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengelola sumber dana yang dimilikinya.

1.1.1 Penyebab Penurunan Efisiensi

Penurunan efisiensi pemerintahan Kabupaten Langkat pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dikarenakan belanja pemerintah daerah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun dan total belanja daerah tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 tidak berbeda terlalu jauh, dari pada tahun 2014 dan tahun 2015 dimana total pendapatan sedikit lebih besar dibandingkan dengan total belanja daerah. Oleh sebab itu faktor penurunan efisiensi pemerintah daerah Kabupaten Langkat diantaranya sebagai berikut :

1. Belanja pemerintah daerah yang meningkat

2. Belanja pemerintah daerah berselisih tidak terlalu jauh dari pendapatan pemerintah daerah.

1.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah Kabupaten Langkat dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Berdasarkan perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang telah dilakukan menunjukkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pemerintah Kabupaten Langkat pada tahun 2011 sebesar 3,27%, tahun 2012 sebesar 10,77%, tahun 2013 sebesar 4,62%, tahun 2014 sebesar 6,99% dan tahun 2015 sebesar 6,80%. Sehingga menunjukkan pemerintah Kabupaten Langkat belum mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintahannya, pemerintah daerah Kabupaten Langkat masih tergantung pada penerimaan pendapatan transfer. Hal ini sejalan dengan pendapat (Abdul Halim, 2004:233) yang menyatakan. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan semakin rendah rasio kemandirian maka semakin tinggi ketergantungan daerah pada bantuan pihak eksternal.

Kemudian Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Langkat tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 Berdasarkan perhitungan kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Langkat pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan pola Instruktif. Dilihat dari pendapatan asli daerah Kabupaten Langkat pada tahun 2011 Rp. 34,540,642,904.35 sebesar 0,38% dari total pendapatan, tahun 2012 pendapatan asli daerah naik menjadi Rp. 129,242,580,780.08 sebesar 1,78% dari total pendapatan, tahun 2013 pendapatan asli daerah turun menjadi Rp. 65,521,499,189.41 sebesar 1,01% dari total pendapatan, tahun 2014 pendapatan asli daerah kembali mengalami kenaikan sebesar Rp. 107,811,975,547.21 dengan persentase 1,81% dari total pendapatan dan tahun 2015 pendapatan asli daerah naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 122,715,359,909.79 dengan persentase 2,47% dari total pendapatan.

Jika dilihat dari tahun ke tahun pola kemandirian keuangannya masih tergolong hubungan Instruktif karena masih tergolong dalam interval 0 – 25%. Hal ini menunjukkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Langkat berupa pola Instruktif yang berarti Pemerintah Kabupaten Langkat belum mandiri atau rendah sekali dalam mengelola keuangan daerahnya. Peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.

Menurut uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama lima tahun pada Pemerintah Kabupaten Langkat memiliki rata – rata kemandiriannya masih tergolong rendah sekali dalam kategori pola hubungan Instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 0 – 25%. Rasio kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Langkat dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini juga relevan dengan peniltian terdahulu yang dilakukan oleh Puput Rizky Pramita (2015) yang menyimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten Kebumen memiliki rata – rata kemandiriannya masih tergolong rendah sekali dan dalam kategori instruktif. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi.

1.2.1 Penyebab Pemerintah Daerah Belum Mandiri

1. Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi pemerintah pusat yang tercermin dari besarnya bantuan pusat baik dari sudut anggaran

rutin yaitu melalui subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pembangunan yaitu bantuan pembangunan daerah.

2. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan Pendapatan Transper.
3. Kurangnya usaha dan kemampuan pemerintah daerah mengelola dan menggali sumber pendapatan yang ada.
4. Masih tingginya jumlah belanja rutin daripada belanja modal daerah.
5. Belum mandiri pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaan belanja pemerintahannya.

1.3 Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Langkat

Dari hasil perhitungan Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang telah peneliti jabarkan dapat diketahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Langkat.

Kinerja keuangan pemerintah daerah jika dilihat dari Rasio Efisiensi menunjukkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Langkat sudah efisien namun masih adanya penurunan efisiensi yang disebabkan oleh peningkatan belanja daerah

dari tahun ke tahun. kemudian peningkatan pendapatan daerah diikuti juga dengan peningkatan belanja daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten Langkat belum mandiri. Pemerintah Kabupaten Langkat masih tergantung pada bantuan pihak eksternal (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi) dalam membiayai kegiatan pemerintahan Kabupaten Langkat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan peneliti dengan menggunakan Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah untuk menilai kinerja keuangan daerah pada pemerintahan Kabupaten Langkat didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi pada pemerintahan Kabupaten Langkat cukup efisien dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Tahun 2011 rasio efisiensi sebesar 95,96%, tahun 2012 96,42%, tahun 2013 98,77%, tahun 2014 95,43% dan tahun 2015 sebesar 90,02%. Akan tetapi penurunan efisiensi terjadi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 hal ini mengakibatkan belanja pemerintah selalu meningkat dari tahun ke tahun.

2. Penurunan Efisiensi Pemerintah daerah Kabupten Langkat pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 disebabkan belanja pemerintah daerah dari tahun 2011 sampai tahun 2013 selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun, total belanja daerah tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 tidak berbeda terlalu jauh. Sedangkan pada tahun 2014 dan tahun 2015 total realisasi belanja dengan total realisasi pendapatan daerah sedikit lebih tinggi daripada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Langkat menunjukkan pola hubungan instruktif. Hal ini berarti keterkaitan pemerintah pusat lebih dominan dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah daerah daripada peran pemerintah daerah.

4. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah daerah belum mandiri dari segi keuangan diantaranya sebagai berikut :
 1. Bantuan pusat baik lebih besar baik dari sudut anggaran rutin yaitu melalui subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pembangunan yaitu bantuan pembangunan daerah.
 2. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan Pendapatan Transfer.
 3. Kurangnya usaha dan kemampuan pemerintah daerah mengelola dan menggali sumber pendapatan yang ada.
 4. Masih tingginya jumlah belanja rutin daripada belanja modal daerah.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan dengan prosedur ilmiah yang berlaku. Adapun keterbatasan penelitian yang dialami oleh penulis ialah sebagai berikut :

1. Keterbatasan waktu pengajuan judul yang diajukan sehingga pelaksanaan penelitian dilaksanakan dengan sesingkat – singkatnya.

2. Keterbatasan pengerjaan proposal penelitian hingga penyusunan skripsi yang terkendala waktu.
3. Keterbatasan teori tentang Rasio Efisiensi dan Kemandirian Keuangan Daerah yang mendukung penelitian.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pemerintah Kabupaten Langkat seharusnya lebih mampu meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga potensi yang dimiliki Kabupaten Langkat mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat sekitar yang berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan meningkatkan dan memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Langkat juga akan lebih mandiri sedikit demi sedikit terhadap ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Untuk pembiayaan pemerintahan Kabupaten Langkat sebaiknya memprioritaskan meningkatkan belanja modal daripada belanja operasi agar nantinya pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Lanfkat lebih efisien.

Kemudian bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak lagi dalam menganalisa kinerja keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim (2008). *Auditing (Dasar – Dasar Audit Laporan Keuangan)* (edisi keempat). Yogyakarta: Unit Penelitian dan Percetakan STIM YKPN.
- Abdul Halim. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Agus Dwiyanto (2003). *Kinerja Tata Pemerintahan Daerah di Indonesia*.
- Abdul Halim (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anindyati Suhartini S. Motto (2010). “Analisis Kinerja Keuangan APBD pada Pemerintah Daerah Kota Gorontalo”. *Skripsi Akunansi*.
- Bastian Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bahrin Assidiqi (2014). “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 – 2012”. *Skripsi Akuntansi*.
- Fitriyah Agustin (2007). “Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)”. *Skripsi Akuntansi*.
- Helfert Erich. A. (1982). *Teknik Analisa Keuangan*. (edisi kelima 1982). Jakarta: Erlangga.
- Harahap, Sofyan Syafri (2004). *Analisis Krisis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ihyaul Ulum, MD (2004). *Akuntansi Sektor Publik* (sebuah pengantar). Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Jumingan. (2006). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta.
- Jusmawati (2011). “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah”. *Skripsi Akuntansi*.
- Mahmudi (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Mahmudi (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Mardiasmo (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mahsun, Mohammad (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFPE
- Puput Risky Pramita (2015). “Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013”. *Skripsi Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, April 2015.
- Peraturan Pemerintah PP Nomor 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintahan PP Nomor 58 Tahun 2005. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Pasal 4*.
- Peraturan Pemerintah PP Nomor 108 Tahun 2000. *Tentang Pedoman Organisasi Daerah*.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: Pasal 1 No. 37 Pasal 4 No. 5*.
- Permendagri Nomor 4 Tahun 2008. *Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Robertson (2002). *Perwujudan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Simbolon, Anthon (2003). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. . Jakarta: Webmaster-Dispenad.
- Simbolon, Anthon (2006). *Akuntabilitas Birokrasi Publik* (edisi revisi). Yogyakarta: UGM
- Sugiyono (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Undang – Undang Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*.
- Wakhyudi (2013). “Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Rasio Keuangan Daerah”. *Jurnal Program Studi Akuntansi*. STIEK Bogor.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT
NPM : 1305170319
Tempat dan tanggal lahir : Stabat, 23 Maret 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln. Ampera II Desa Stabat Lama Barat Kec.
Wampu Kab. Langkat
Anak Ke : 2 dari 6 bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : SYAMSUL BAHRI
Nama Ibu : HAYATI
Alamat : Jln. Ampera II Desa Stabat Lama Barat Kec.
Wampu Kab. Langkat

Pendidikan Formal

1. SDN No. 056612 Pasar Batu Tamat tahun 2006
2. SMP Negeri 5 Stabat Tamat tahun 2009
3. SMK Negeri 1 Stabat Tamat tahun 2012
4. Tahun 2013 - 2017, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, April 2017

MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT